HISTORIA VITAE
Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

HISTORIA VITAE, Vol. 01, No.01, April 2021

PERAN AHMAD SUBARDJO DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA (1942-1948)

Roni Rohadi, Hendra Kurniawan
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tiga permasalahan pokok, yaitu latar belakang kehidupan Ahmad Subardjo, perannya pada masa pendudukan Jepang, dan kiprahnya pada masa awal kemerdekaan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup lima tahapan yaitu perumusan judul, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, penulisan sejarah. Penulisan ini menggunakan pendekatan politik dan ditulis secara deskriptif analitis. Kajian menunjukkan bahwa dengan pendidikannya membawa Ahmad Subardjo memulai karier politiknya dengan terlibat aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan seperti *Jong Java* serta Perhimpunan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Subardjo terlibat dalam persiapan dan perumusan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan Ahmad Subardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama, dan bertanggung jawab menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional.

***Kata Kunci**: Ahmad Subardjo, Perjuangan Kemerdekaan, Indonesia*

ABSTRACT

This paper aims to describe three main topics about the life of Ahmad Subardjo, namely his background, his role during the Japanese occupation, and his work during the early days of independent Indonesia. This research is conducted using the historical method which includes collection of sources, verification (source criticism), interpretation, and writing. The research uses political approach and is written using descriptive and analytical method. The research shows that with his education, Ahmad Subardjo started his political career by being actively involved in various youth organizations such as *Jong Java* and *Perhimpunan Indonesia*. During the Japanese occupation, Subardjo was involved in the preparation and formulation of the text of the proclamation. In the early days of independence, he served as the first Indonesian Foreign Minister, and was responsible for spreading the news of the proclamation of Indonesian independence so that Indonesian independence was recognized by the international community.

***Keywords**: Ahmad Subardjo, Independence struggle, Indonesia*

PENDAHULUAN

Masa pendudukan Jepang di Indonesia merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia (Ricklefs, 2005, 405). Tentara Jepang mendarat pertama kali pada tanggal 11 Januari 1942 yang diawali dengan menguasai daerah-daerah penghasil minyak, seperti Tarakan, Balikpapan serta beberapa daerah di Kalimantan lainnya. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di tiga tempat di Pulau Jawa, yaitu di Banten, Indramayu, dan Rembang, masing-masing dengan kekuatan lebih kurang satu divisi (Nasution, 1977, 84). Melalui Indramayu, dengan cepat Jepang berhasil merebut pangkalan udara Kalijati untuk dipersiapkan sebagai pangkalan pesawat. Pada 8 Maret 1942, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati oleh Pemerintah Hindia Belanda. Isi dari perjanjian tersebut adalah Pemerintah Hindia Belanda bersedia meninggalkan wilayah Hindia Belanda dan menyerahkan seluruh wilayah Hindia Belanda secara *de facto* dan *de jure* di bawah kekuasaan Jepang.

Sejak kedatangannya di Indonesia, bala tentara Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara mengakui bahwa Jepang merupakan saudara tua bangsa Indonesia yang datang untuk melepaskan Indonesia dari cengkeraman bangsa Barat. Jepang memperbolehkan lagu *Indonesia Raya* diperdengarkan dan mengizinkan rakyat Indonesia untuk mengibarkan Bendera Merah Putih. Jepang membebaskan tokoh-tokoh yang menjadi tahanan politik pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Dalam menjalankan propagandanya dan untuk mendapatkan lebih banyak simpati dari masyarakat Indonesia, pihak Jepang membentuk berbagai macam organisasi dengan melibatkan masyarakat Indonesia untuk ikut sebagai anggotanya, di antaranya adalah Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan), Panitia Sembilan, dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Organisasi-organisasi bentukan Jepang ini melibatkan beberapa tokoh nasionalis yang ditunjuk sebagai anggota dan pengurus dari organisasi tersebut. Di antara tokoh-tokoh nasional yang terlibat terdapat nama Ahmad Subardjo. Ia merupakan salah satu tokoh yang memberikan sumbangan besar bagi bangsa Indonesia. Ahmad Subardjo ikut membantu bangsa Indonesia untuk lepas dari kolonialisme hingga lahirnya proklamasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN AHMAD SUBARDJO

Latar Belakang Keluarga

Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Desa Teluk Jambe adalah sebuah desa kecil di tepi sungai Citarum dan merupakan daerah penghasil beras di Jawa Barat (Subardjo, 1978, 35). Ahmad Subardjo merupakan anak bungsu dari empat bersaudara yaitu hasil perkawinan dari Teuku Yusuf dengan Wardinah. Ayah Subardjo berasal dari keturunan bangsawan Aceh sedangkan ibunya seorang putri dari Camat Cirebon yang berasal dari Jawa Tengah (Ghazali, 1998, 78). Sebagai anak bungsu dari empat bersaudara, Ahmad Subardjo merupakan anak kesayangan kedua orang tuanya. Saudara perempuan Subardjo yang pertama bernama Siti Chadijah, Saudara perempuan Subardjo yang nomor dua bernama Siti Alimah Dan saudara laki-laki Subardjo bernama Abdul Rachman. Sewaktu kecil Ahmad Subardjo diberi nama Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi, seorang rekan ayah Subardjo bernama Raden Mas Said mengusulkan agar dinamai dengan nama jawa yaitu Subardjo. Kemudian kakek dari pihak ibu menambahkan nama Ahmad di muka nama Subardjo, sehingga lengkap menjadi Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo (Subardjo, 1978, 33-34).

Subardjo mengingat dengan jelas sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Ayah Subardjo memiliki sifat pendiam, ia hanya berbicara apabila ada sesuatu hal yang dianggap perlu untuk disampaikan. Berbeda dengan sifat ayah Subardjo, ibu Subardjo memiliki sifat kebalikan dari ayah Subardjo. Ibu Subardjo termasuk orang yang memiliki sifat cekatan, cepat bertindak dan penuh dengan pikiran-pikiran yang berguna (Subardjo, 1978, 39). Ibu Subardjo memiliki keterampilan dalam membatik dan memasak. Selain itu Ibu Subardjo juga pandai mengaji dan menulis huruf-huruf Jawa. Dalam ingatan Subardjo tentang ayahnya ialah petuah-petuah yang pernah diajarkan kepadanya seperti ungkapan dalam bahasa Jawa *sepi ing pamrih, rame ing gawe*. Makna ungkapan tersebut adalah kita bisa mempunyai ambisi namun jangan mengejar kemasyuran, jalankan kewajiban serta tugas dan jangan pedulikan kata orang tentang hasil kerja (Subardjo, 1978, 39).

Pendidikan

Pada awal masuk sekolah, Ahmad Subardjo masuk di Sekolah Rendah Eropa III (*3 e Europeesche Lagere School-ELS*) yang letaknya di daerah Kramat, kemudian pindah ke Sekolah Rendah Eropa Pertama B (ELSB) di Schoolweg dekat daerah Pasar Baru. Sewaktu masuk ke Sekolah Rendah Eropa III, ia sudah pintar menggunakan

bahasa Belanda. Subardjo sangat rajin membaca buku-buku dan majalah yang berbahasa Belanda. Selain itu ia juga suka membaca buku-buku karya *Karl May* dan *Jules Verne.* Kisah petualangan *Bufallo Bill*, perjalanan khayalan ke luar angkasa seperti kehidupan di bulan, kehidupan di dalam lautan serta kehidupan pahit yang dialami oleh orang-orang berkulit gelap di Amerika sudah akrab dibaca Subardjo (Subardjo, 1978, 38).

Ketika pindah ke Sekolah Rendah Pertama B (ELS-B) Subardjo mendapati seorang Kepala Sekolah orang Belanda bernama Vleming. Vleming berpendapat bahwa orang pribumi sangat bodoh dan tidak dapat disamakan dengan orang Eropa atau bangsa lain. Menurut pendapat Vleming bahwa penduduk asli tidak mempunyai kemampuan untuk menerima pendidikan lebih tinggi dan mereka lebih cocok untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah dan kasar (Subardjo, 1978, 44). Hal tersebut membuat Subardjo merasa sakit hati dan bersumpah agar belajar lebih giat, untuk menunjukkan bahwa perkataan Vleming tentang orang pribumi itu salah.

Setelah berhasil lulus dari ELS-B, Subardjo masuk ke Sekolah Pangeran Hendrik. Setelah berjuang selama dua tahun, Subardjo akhirnya mengundurkan diri dari Sekolah Pangeran Hendrik dan pindah ke Sekolah Raja Willem (KW III) di Salemba (Subardjo, 1978, 46). Dari seluruh mata pelajaran yang diterima di KW III (HBS), mata pelajaran Sejarah Umum adalah yang paling menarik bagi Subardjo (Subardjo, 1978, 56). Selama menempuh pendidikan di HBS, Subardjo menghabiskan waktunya dengan belajar dan bermain musik. Kesibukan-kesibukan dalam bermain musik bukanlah menjadi hambatan bagi Subardjo untuk menyelesaikan pendidikannya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Raja Willem III pada tahun 1917. Kemudian pada tahun 1919, Subardjo melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda pada bidang Hukum Internasional. Pada tahun 1922, Ahmad Subardjo memperoleh Sarjana Muda Hukum dan mendapatkan Sarjana penuh pada tahun 1933 dengan gelar *Meester in de Rechten* (Sarjana Hukum) dari Universitas Leiden, Belanda.

Awal Karier Politik Ahmad Subardjo

Jong Java

Setelah lulus HBS Ahmad Subardjo mengisi kegiatannya dengan bergabung di organisasi *Jong Java* sambil menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan pendidikannya. Organisasi *Jong Java* pada awalnya bernama *Tri Koro Dharmo* yang dibentuk oleh Dr. Satiman Wiryosandjoyo pada tanggal 7 Maret 1915. Pada perkembangannya *Tri Koro Dharmo* lebih didominasi oleh orang-orang suku Jawa

sehingga menyebabkan suku-suku lain merasa keberatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut *Tri Koro Dharmo* diubah menjadi *Jong Java* pada tahun 1919.

Pada tahun 1918, Ahmad Subarjo merasa tertarik untuk menghadiri Kongres yang diselenggarakan di Surakarta. Kongres yang berlangsung dari tanggal 5-7 Juli tersebut mengusung tema tentang perkembangan kebudayaan Jawa. Subardjo menyadari kekurangannya dalam pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan bangsanya sendiri (Subardjo, 1978, 72). Oleh karena itu Subardjo merasa perlu mengimbangi pengaruh pendidikan kebarat-baratan yang telah ia terima dan harus memperdalam pengetahuan mengenai aspek-aspek kebudayaan Timur, khususnya kebudayaan Jawa (Subardjo, 1978, 73).

Perhimpunan Indonesia (PI)

Pada tahun 1919, Ahmad Subardjo berlayar ke negeri Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden. Di Eropa ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia dan pernah terpilih menjadi ketua pada tahun 1919-1920. Perhimpunan Indonesia pada awalnya bernama *Indische Vereeniging* yang didirikan oleh para pelajar Indonesia pada tahun 1908 di Den Haag. Berdirinya Perhimpunan Indonesia merupakan suatu reaksi spontan atas berdirinya *Budi Utomo* (Subardjo, 1978, 109). *Indische Vereeniging* bergerak pada bidang sosial-budaya dan mendapat sokongan penuh dari pihak Belanda, terdiri dari orang-orang Belanda terkemuka yang berpengaruh. Sesuai perkembangannya, *Indische Vereeniging* berganti nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922. Kemudian pada tahun 1925, diubah menjadi Perhimpunan Indonesia (Subardjo, 1978, 117).

Pada tahun 1923, bertepatan dengan perayaan ulang tahun perhimpunan yang ke-15, Perhimpunan Indonesia berencana menerbitkan sebuah Buku Peringatan (*Gedenkboek*). Ahmad Subardjo juga menjadi salah satu yang menyumbangkan karyanya dalam buku tersebut. Artikel yang ditulis oleh Subardjo berjudul "*Opgang"* (Maju Ke depan) yang berisikan tentang perlunya perubahan semangat berdasarkan pandangan hidup yang dinamis agar bangsa Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan zaman modern untuk mempertahankan kehidupannya dengan kepribadian nasional yang bergolak (Subardjo, 1978, 27).

Pada tanggal 10-15 Februari 1927, diadakan Kongres Internasional Anti Imperialis di Brussel. Kongres ini dihadiri sebanyak 21 negara-negara lain dari 5 benua. Ahmad Subardjo bersama dengan Mohammad Hatta, Semaun, Gatot Tarunomihardjo, Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak datang menghadiri Kongres tersebut sebagai delegasi dari Indonesia. Pada kesempatan Kongres tersebut, Subardjo turut

mengemukakan pemikiran-pemikirannya. Pokok-pokok pemikiran yang dikemukakan oleh Subardjo mengenai bagaimana upaya-upaya yang hendak dilakukan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme adalah dengan bersatu dan sepakat.

AHMAD SUBARDJO PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

Bekerja untuk Kantor Militer Jepang

Pada awal masa pendudukan Jepang di Indonesia, Ahmad Subardjo bekerja di kantor penasihat Angkatan Darat Jepang di Jakarta yang dikepalai oleh Mohammad Hatta. Namun keberadaan kantor penasihat tersebut hanya bertahan selama satu tahun, karena Mohammad Hatta diangkat sebagai anggota Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Selepas dari Kantor Penasehat Angkatan Darat Jepang di Jakarta, Ahmad Subardjo bekerja sebagai Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang (*Kaigun Bukanhu*) di bawah pimpinan Laksamana Muda Maeda. Tugas Subardjo adalah memberikan data-data kepada Laksamana Muda Maeda mengenai sejarah pergerakan nasional, konsepsi-konsepsi dasar nasionalisme Indonesia, sikap terhadap kelompok-kelompok rasial yang hidup di masyarakat Indonesia, keanekaragaman aspek-aspek hukum Belanda serta penerapannya selama masa kolonial Hindia Belanda, adat-istiadat dan tradisi di Indonesia, dan reaksi sebenarnya dari rakyat terhadap pemerintahan Angkatan Darat Jepang di Jawa (Subardjo, 1978, 245).

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Subardjo melakukan perjalanan mengelilingi pulau Jawa untuk melakukan penelitian dari desa ke desa, dari distrik ke distrik, dan dari kota ke kota. Subardjo menyaksikan sendiri bagaimana keadaan masyarakat pedesaan Jawa yang sangat menyedihkan akibat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Angkatan Darat Jepang (Subardjo, 1978, 254). Rakyat Indonesia harus menghadapi sikap pasukan Angkatan Darat Jepang yang sewenang-wenang dalam beberapa hal misalnya dalam penagihan hasil pajak pertanian. Selain itu, tindakan paksaan dalam pengambilan putera atau keluarga laki-laki untuk tujuan militer yang mereka jadikan sebagai *romusha*. Sikap Angkatan Darat Jepang tersebut membuat rakyat Indonesia mempunyai rasa benci yang mendalam terhadap orang-orang Jepang dan semua yang berbau Jepang. Tidak terkecuali orang-orang yang bekerja didalam suatu badan atau organisasi bentukan Jepang.

Turut Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia

Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)

Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh Jepang di peperangan Pasifik melawan tentara Sekutu, menyebabkan *Gunseikanbu* (Pemerintah Militer Jepang)

membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) atau dalam bahasa Jepang disebut "*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai.*" BPUPK dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia kepada Jepang yang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Badan ini beranggotakan 60 orang yang merupakan pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia dan diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat serta R.P. Suroso dan Ichibangase Yoshio (wakil dari *Gunseikanbu*) sebagai wakil ketua. BPUPK mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Mei - 1 Juni 1945, dan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 – 17 Juli 1945.

Di dalam BPUPK, Ahmad Subardjo berperan serta dalam menyumbangkan berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Pada sidang BPUPK yang pertama Subardjo mengatakan,

> Dalam merancang suatu konstitusi bagi Indonesia, adalah suatu kesalahan besar bila kita hanya meniru atau menuliskan kembali suatu Konstitusi dari negara-negara lain. Apa yang baik bagi negara-negara lain, belum tentu baik daripada suatu falsafah hidup yang asing bagi alam pikiran serta pandangan mengenai kehidupan dan dunia (Subardjo, 1978, 279).

Usulan ini kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BPUPK untuk menyusun dasar negara dengan mengambil beberapa teori-teori dari para filsuf terkenal seperti Voltaire, J.J. Rousseau, Montesquieu, John Lock, H. Spencer, dan Thomas Paine untuk teori individualistis, Karl Marx, Engels, dan Lenin untuk teori kelas, Adam Miller dan Hegel untuk teori Negara Kesatuan. Berkat pemikiran tersebut, Ahmad Subardjo diikutsertakan dalam Panitia Sembilan yang dibentuk oleh Sukarno dengan tujuan merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar (Subardjo, 1978, 280).

Peran Ahmad Subardjo dalam Panitia Sembilan juga sangat besar, karena gagasan yang dia sampaikan akhirnya dimasukkan sebagai paragraf I pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan" (Subardjo, 1978, 281). BPUPK menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 1945 dan menghasilkan sebuah draft konstitusi yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang berisi 16 bab dan 37 pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan (Subardjo, 1978, 289).

Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI)

Terdesaknya Jepang dengan sekutu di medan peperangan, membuat Komandan Angkatan Perang Daerah Bagian Selatan, Marsekal Terauchi mengumumkan

pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945 dan memanggil Sukarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat untuk datang ke Saigon. Mereka tiba di Saigon pada 11 Agustus 1945 dan diterima Terauchi yang langsung mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI (Subardjo, 1978, 296). PPKI beranggotakan 21 orang yang beranggotakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Anggota-anggota ini terdiri dari tokoh-tokoh nasional terkenal sehingga badan tersebut merupakan perwakilan yang representatif bagi seluruh Indonesia. PPKI ditunjang oleh badan perancang yang terdiri dari para penasehat yang diketuai oleh Mohammad Hatta, dan Ahmad Subardjo diangkat sebagai wakil ketua badan perancang yang bertugas untuk menyampaikan surat undangan rapat PPKI kepada masing-masing anggota (Subardjo, 1978, 301).

PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melanjutkan tugas dari BPUPK yang sebelumnya belum terlaksana dengan baik. PPKI harus menyelesaikan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar. PPKI dalam menjalankan tugasnya ternyata tidak terlaksana dengan baik karena, terjadi sebuah kejadian yang kemudian disebut sebagai Peristiwa Rengasdengklok. Adanya peristiwa tersebut membuat pekerjaan PPKI terpaksa terhenti.

Menjelang dan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan

Peristiwa Rengasdengklok

Pada tanggal 15 Agustus, pukul 11.00 malam, terjadi perdebatan hebat antara golongan tua dengan muda. Mereka menyatakan pendapatnya masing-masing tentang bagaimana proklamasi harus dilaksanakan. Baik golongan tua maupun golongan muda sependapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan, namun mereka tidak sependapat dalam cara mengemukakan dan cara pelaksanaannya (Wiharyanto, 2011, 15).

Golongan tua berpendapat bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus dilakukan tanpa pertumpahan darah dan menginginkan agar diadakan rapat PPKI terlebih dahulu pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda tidak setuju dengan alasan golongan tua. Golongan muda menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang. Mereka juga tidak menyetujui lahirnya proklamasi kemerdekaan karena janji Jenderal Terauchi. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa proklamasi harus dilahirkan dengan kekuatan sendiri lepas sama sekali dari pemerintah Jepang. Mereka yakin bahwa janji Jepang tersebut hanya tipu muslihat belaka (Wiharyanto, 2011, 16).

Setelah melalui perdebatan yang panjang, golongan tua tetap bersikeras agar proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI yang akan dilaksanakan esok hari pada tanggal 16 Agustus. Golongan muda yang merasa kecewa kemudian mengadakan rapat sekitar pukul 24.00 bertempat di jalan Cikini 71 (Wirasoeminta, 1995, 32). Dalam rapat tersebut, golongan memutuskan untuk menyingkirkan Sukarno dan Hatta ke luar kota agar kedua tokoh ini terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua (Wiharyanto, 2011, 18). Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 04.00, golongan muda menugaskan Sukarni dan Singgih beserta beberapa pemuda untuk menjemput Sukarno dan Hatta di kediamannya masing-masing untuk dibawa ke Rengasdengklok. Rengasdengklok dipilih karena dirasa aman jauh dari jangkauan tentara Jepang serta tempat tersebut berada dalam wilayah pengawasan PETA (Wirasoeminta, 1995, 30-35). Di sana mereka berusaha mendesak Sukarno dan Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia (Kahin, 1995, 171).

Pada tanggal 16 Agustus pagi, Subardjo dikejutkan dengan kabar bahwa Sukarno dan Hatta telah diculik. Subardjo kebingungan karena sebentar lagi pada pukul 10.00 pagi, para anggota-anggota PPKI akan segera mengadakan rapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanpa membuang waktu terlalu lama, Subardjo segera berusaha mencari tahu keberadaan Sukarno dan Hatta. Ia menemui Wikana dan berusaha mendesak Wikana untuk memberitahu di mana tempat Sukarno dan Hatta disembunyikan. Karena terus menerus didesak oleh Subardjo dan melalui perbincangan yang panjang akhirnya Subardjo mampu meyakinkan Wikana bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Proklamasi belum bisa dilaksanakan apabila Sukarno dan Hatta tidak ada di Jakarta. Setelah mendapatkan informasi dari Wikana, Subardjo meminta agar diantarkan ke Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno dan Hatta untuk pulang kembali ke Jakarta.

Setibanya di Rengasdengklok Subardjo kemudian dibawa menemui Mayor Subeno yang segera mengadakan pembicaraan singkat sekaligus meminta jaminan secepatnya proklamasi kemerdekaan diumumkan. Mayor Subeno meminta proklamasi kemerdekaan dilaksanakan saat itu juga. Permintaan itu ditolak Subardjo karena tak masuk akal. Selanjutnya Subardjo meyakinkan Mayor Subeno bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan sesegera mungkin dan memberikan jaminan apabila ia gagal maka ia bersedia untuk ditembak mati oleh Mayor Subeno sendiri. Jaminan dari Subardjo tersebut berhasil meyakinkan Mayor Subeno dan Subardjo diperbolehkan untuk membawa Sukarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Perumusan Teks Proklamasi

Setelah rombongan Subardjo tiba di Jakarta kemudian langsung dilanjutkan ke kediaman Laksamana Maeda untuk mengadakan rapat terkait dengan urusan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalam ruangan rumah itu yang hadir dan berada duduk di meja bundar ketika itu adalah Sukarno, Hatta, Subardjo, Maeda, Myoshi, sedang sedikit agak di belakang dekat meja ada Sukarni, BM. Diah dan Soediro.

Dalam merumuskan teks proklamasi, Subardjo dan Hatta menyampaikan pendapat secara lisan dan kemudian Sukarno mencatatnya pada secarik kertas. Subardjo menyumbangkan pokok pemikirannya pada alinea pertama rumusan teks proklamasi, yaitu: 'Kami Rakyat Indonesia, Dengan ini menyatakan kemerdekaan kami."

Kemudian Hatta menyatakan pendapatnya "Ini tidak cukup dan merupakan suatu pernyataan abstrak tanpa isi. Kita harus menghantarkan kemerdekaan kita pada pelaksanaan yang nyata dan kita tidak mungkin dapat berbuat demikian tanpa kekuasaan berada di tangan kita. Kita harus menambahkan pikiran tentang penyerahan kekuasaan dari Jepang ke dalam tangan kita sendiri" (Kahin, 1995, 335).

Timbullah kemudian beberapa pertimbangan mengenai rumusan yang tepat tentang ide penyerahan kekuasaan tersebut. Hatta menyatakan sebagai berikut : "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya" (Kahin, 1995, 335).

Kemudian rumusan teks proklamasi dalam bentuk yang terakhir dan lebih disederhanakan dengan penuh hikmat: "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya" (Kahin, 1995, 335).

Setelah selesai dibuat dan beberapa kata harus diganti, rumusan teks proklamasi tersebut kemudian diserahkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk disetujui. Lalu kemudian atas usul dari Sukarni menyatakan agar teks tersebut cukup ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta saja yang mewakili bangsa Indonesia. Kemudian naskah proklamasi tersebut diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik (Wiharyanto, 2011, 20).

Dalam proses pengetikan dilakukan beberapa perubahan. Perubahan-perubahan itu sebagai berikut : (1) kata "tempoh" diubah menjadi "tempo", (2) kata "wakil-wakil bangsa Indonesia" diubah menjadi "atas nama bangsa Indonesia", dan (3) Rumusan "Djakarta 17-8-'05" diubah menjadi "Djakarta hari 17 boelan 8 tahoen '05"

(Wiharyanto, 2011, 20). Naskah yang telah diketik tersebut kemudian diserahkan kepada Sukarno dan Hatta untuk ditandatangani. Setelah semuanya selesai, Hatta meminta kepada B.M. Diah dan para pemuda dari golongan pers agar segera memperbanyak dan mengumumkan bahwa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia telah berhasil dirumuskan dan akan dibacakan pada pukul 10.00 pagi di kediaman Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 (Hatta, 1978, 453).

AHMAD SUBARDJO PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN

Menjabat sebagai Menteri Luar Negeri

Di dalam susunan Kabinet pertama Republik Indonesia tersebut, Ahmad Subardjo terpilih sebagai menteri luar negeri. Ketika terpilih sebagai menteri luar negeri yang pertama, Subardjo menghadapi suatu keadaan yang cukup sulit, lantaran ia belum mempunyai kantor sebagai tempat ia bekerja, belum tersedia alat-alat kantor yang mendukung pekerjaannya dan belum mempunyai pegawai serta staf yang membantunya bekerja (Hatta, 1978, 352). Selain itu, Subardjo juga harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan untuk menyambut kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kekuatan pemerintahan yang sah oleh hukum.

Situasi yang dihadapi oleh Subardjo sangat berbeda dengan teman-temannya yang sudah dapat mulai bekerja secara normal dan mempunyai segala sesuatu untuk memimpin suatu Departemen Pemerintahan. Untuk mendapatkan pegawai-pegawainya, Subardjo memasang iklan di “Asia Raya” yang berbunyi “ Siapakah yang ingin menjadi pegawai Departemen Luar Negeri?”. Karena iklan tersebut, Subardjo mendapatkan pegawai-pegawainya. Ada sebanyak 10 orang yang melamar menjadi pegawai di Departemen Luar Negeri. Subardjo membagi tugas kepada pegawai-pegawainya itu, lima orang dipekerjakan sebagai Sekretaris dan lima orang lainnya dipekerjakan untuk mengatur administrasi. Subardjo menjadikan rumah yang ia diami di Cikini Raya no. 82 sebagai tempat ia bekerja, karena belum mendapatkan sebuah gedung untuk dijadikan sebagai kantor Departemen Luar Negeri (Hatta, 1978, 353).

Usaha Mendapatkan Pengakuan Dunia Internasional

Sebagai Suatu negara yang sudah merdeka, ternyata tidak cukup hanya dengan memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, tetapi juga perlu pengakuan internasional maupun tujuan yang jelas. Mengenai tujuan negara, secara jelas telah dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga perdamaian dunia. Setelah Republik Indonesia berdiri, syarat

tambahan yang belum diperoleh adalah pengakuan internasional (Wiharyanto, 2011, 38). Pengakuan internasional ini masih harus diperjuangkan sebab Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan adanya pengakuan dunia internasional, hak-hak bangsa Indonesia sebagai sebuah negara merdeka akan dihormati, dan mendapat dukungan dari dunia internasional.

Sejak terpilihnya Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang pertama, ia mempunyai tugas utama yaitu mengusahakan agar secepatnya Republik Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan menyiarkan melalui siaran radio dan mengirimkan radiogram-radiogram. Selain itu Pemerintah Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan memiliki itikad baik dalam upaya membantu menyelesaikan konflik internasional serta memiliki struktur pemerintahan yang sah.

Pendapat umum dunia pada waktu itu beranggapan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disiarkan melalui radio-radio kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu Republik bikinan Jepang. Angkatan Perang Sekutu yang mendarat di pulau Jawa pada akhir bulan September 1945 dibawah pimpinan Letnan Jenderal Christison mengetahui melalui Badan Penyelidiknya bahwa berita yang beredar tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi (Subardjo, 1972, 29). Atas kerja keras Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri dalam menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio berhasil mendapatkan banyak dukungan dari luar negeri atas apa yang sedang terjadi di Indonesia. Dukungan-dukungan tersebut berasal dari Sydney, Canberra, New Delhi, Manchester, San Francisco, dan Singapura.

Ahmad Subardjo Setelah Tidak di Kabinet

Sejak bentuk pemerintahan Republik Indonesia berganti dari pemerintahan presidential menjadi pemerintahan parlementer pada 14 November 1945, Ahmad Subardjo secara resmi telah meletakkan jabatannya sebagai menteri luar negeri. Perubahan bentuk pemerintahan itu dinyatakan dalam Maklumat Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 14 November 1945. Untuk itu, dibentuklah suatu susunan pemerintahan parlementer. Pada saat itu Sutan Sjahrir yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri luar negeri, Ahmad Subardjo memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta. Subardjo kemudian mendapat tawaran dari Dr. Sukiman untuk bergabung menjadi penasihat politik Jenderal Sudirman. Tugas dari penasihat politik tersebut ialah memberikan analisis tentang situasi politik, khususnya

dalam menghadapi Belanda yang sudah menduduki Jakarta dan sekitarnya. Subardjo menjalankan tugas sebagai penasihat Jenderal Sudirman tersebut bersama-sama dengan Dr. Sukiman, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan Ki Hadjar Dewantara (Legge, 1993, 184). Pekerjaan sebagai penasehat politik Jenderal Sudirman tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena situasi sulit yang harus dihadapi oleh Subardjo.

Selama masa-masa revolusi kemerdekaan Indonesia berlangsung, Ahmad Subardjo berada di dalam penjara dan menghabiskan waktunya menjadi tahanan pemerintahan Sjahrir. Subardjo dipenjara oleh pemerintahan kabinet Sjahrir dan Amir Sjarifuddin karena dianggap sebagai pihak yang dapat membahayakan jalannya pemerintahan. Subardjo dianggap sebagai kolaborator Jepang dengan paham fasis yang membahayakan kelangsungan pemerintahan Indonesia (Legge, 1993, 184). Subardjo ditangkap dan dibawa ke penjara di Tretes sebagai tahanan politik pemerintahan Sjahrir, kemudian dipindahkan ke penjara di Magelang. Pada waktu berada di penjara Magelang, situasi pada saat itu ialah pasukan Belanda tengah melakukan Aksi Militer ke-I. Karena berada dalam situasi yang berbahaya, semua tahanan politik di penjara Magelang dipindahkan ke penjara Ponorogo kemudian ke Mojokerto, dan Madiun. Ahmad Subardjo akhirnya dibebaskan dari penjara pada 17 Agustus 1948. Subardjo dibebaskan dari penjara dengan keputusan Presiden Sukarno yang membebaskan semua tahanan politik pada masa pemerintahan Sjahrir.

SIMPULAN

Ahmad Subardjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Subardjo merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Subardjo ialah di ELS (*Europeesche Lagere School*), HBS (*Hoogere Burgere School*), dan kemudian di Universitas Leiden hingga memperoleh gelar *Meester In de Recten*. Ketika masih duduk di bangku sekolah hingga menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, Subardjo telah terlibat aktif di dalam organisasi-organisasi kepemudaan seperti *Tri Koro Dharmo*, Perhimpunan Indonesia dan pernah terpilih menjadi ketua pada tahun 1919-1920. Selama di Eropa, Subardjo sering mengikuti kegiatan politik dan menyebarkan propaganda tentang kemerdekaan Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Ahmad Subardjo sempat bekerja di kantor penasihat Angkatan Darat Jepang di bawah pimpinan Mohammad Hatta. Setelah kantor penasihat Angkatan Darat Jepang dibubarkan Ahmad Subardjo kemudian bekerja sebagai Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang (*Kaigun Bukanhu*) di bawah pimpinan Laksamana Muda Maeda. Ahmad Subardjo juga turut terlibat pada saat bangsa Indonesia tengah mempersiapkan segala usaha untuk meraih kemerdekaan dari Jepang.

Subardjo turut tergabung dalam panitia BPUPK (Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan), PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dan terlibat juga dalam Panitia Sembilan. Pada saat menjelang dan sekitar peristiwa proklamasi, Ahmad Subardjo juga turut terlibat dalam beberapa peristiwa-peristiwa penting mulai dari peristiwa Rengasdengklok hingga perumusan teks proklamasi Kemerdekaan.

Pada saat pembentukan pemerintahan Indonesia, Ahmad Subardjo menjabat sebagai menteri luar negeri Indonesia yang pertama. Sebagai menteri luar negeri Indonesia yang pertama, Subardjo mengusahakan agar bangsa Indonesia mendapat pengakuan yang sah dari dunia internasional atas kemerdekaan yang berhasil diraih. Selain itu, Subardjo juga berusaha menyebarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok seluruh dunia melalui siaran-siaran radio. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Ahmad Subardjo bekerja sebagai penasihat politik Jenderal Sudirman. Pada masa pemerintahan kabinet Sjahrir, setiap gerak-geriknya Ahmad Subardjo sangat diawasi oleh pemerintah. Ahmad Subardjo dianggap sebagai kolaborator Jepang yang dapat membahayakan jalannya pemerintahan hingga kemudian ia ditangkap dan menjadi tahanan pemerintahan Sjahrir. Subardjo ditahan di penjara Tretes, Magelang, Ponorogo, Mojokerto, dan Madiun. Kemudian pada 17 Agustus 1948 Subardjo dibebaskan dari penjara oleh keputusan presiden Sukarno.

DAFTAR PUSTAKA

Ghazali, Zulfikar dkk. 1998. *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subardjo*. Jakarta : Depdikbud.

Hatta, Mohammad. 1978. *Memoir*, Jakarta : PT. Tintamas Indonesia.

Kahin, George Mc Turnan. 1995. *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*. Jakarta. UNS Press – Pustaka Sinar Harapan.

Legge, J.D. 1993. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Nasution, A.H. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid I*. Bandung : Angkasa.

Ricklefs, M.C . 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.

Subardjo, Ahmad. 1972. *Lahirnya Republik Indonesia, Suatu Tinjauan dan Kisah Pengalaman*. Jakarta : PT. Kinta.

---------- 1975. *Peranan Ide-Ide Dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta : Idayu.

---------- 1978. *Kesadaran Nasional, Sebuah Otobiografi*. Jakarta : Gunung Agung.

Wiharyanto, A. Kardiyat. 2011. *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

Wirasoeminta, Sanusi. 1995. *Rengasdengklok, Tentara PETA & Proklamasi 17 Agustus 1945*. Yogyakarta : Pustaka Nusatama.